

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK ISLAM HINDIA BELANDA

Dua dasawarsa terakhir abad ke-19 dan dua dasawarsa pertama abad ke-20 dikenal sebagai puncak abad imperialisme, yang merupakan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk kekaisaran. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di kepulauan nusantara ini adalah beragama Islam.⁶¹ Untuk menghadapi masalah tersebut pemerintahan kolonial menerapkan beberapa kebijakan bagi kaum pribumi yang dikenal dengan politik Islam. Politik Islam Hindia- Belanda merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintahan untuk melakukan *Zending* kepada penduduk Indonesia yang mayoritas Islam. Awalnya usaha ini mengalami kesulitan, dikarenakan keengganan Belanda untuk mencampuri urusan agama pribumi, yang akan berdampak pada pemberontakan-pemberontakan yang mungkin akan dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam. Keengganan mereka ini tercermin dalam Undang-undang Hindia-Belanda ayat 119 RR: “setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama”.⁶² Undang- undang ini berakibat pada kebijaksanaan Belanda yang tidak mau memberikan bantuan pada pembangunan masjid pada tahun 1865.

Hubungan antara pemerintah kolonial dengan agama tidaklah bisa dilepaskan dari hubungan antar sesama umat beragama, yakni antara umat Islam

⁶¹ Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 9.

⁶² *Ibid.*, 27.

dan Kristen (Protestan dan Katolik). Hal ini terlihat jelas pada hubungan Islam – Kristen yang melatar belakangi hubungan Belanda-Indonesia, dan pada hubungan para penguasa Belanda – yang umumnya beragama Kristen dengan pribumi yang umumnya beragama Islam. Dalam hal ini keinginan untuk tetap menjajah, betapapun mengakibatkan pemerintah kolonial tidak akan mampu memperlakukan agama pribumi sama dengan agamanya sendiri. Juga tidak akan mampu memperlakukan pribumi yang beragama lain sama dengan pribumi yang seagama dengannya.

Latar belakang ini bisa menjelaskan mengapa sering terjadi diskriminasi dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama, penganut Kristen pada umumnya menikmati berbagai keuntungan dari pemerintah Belanda, baik dalam memasuki sekolah pemerintah, mencari lapangan kerja maupun memperoleh kenaikan pangkat.⁶³ Diskriminasi akan nampak jelas pada alokasi anggaran, sehingga pada suatu saat agama Islam hanya memperoleh sepersekian persen dari anggaran agama Kristen. Menurut ketetapan Umum Perundang-undangan (Algemeene Bepaling van Wetgeving) tahun 1849, golongan Kristen termasuk kategori Eropa, penduduk pribumi yang beragama kristen menikmati hak hukum yang sama dengan saudara- saudara yang sama dengan saudara- saudara mereka seagama, dari kalangan bangsa Eropa. Walaupun peraturan pemerintahan tahun 1854 sudah mengubah posisi hukum anak mas ini, namun dalam kenyataan perlakuan diskriminatif masih tidak bisa dihindarkan.⁶⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶³ Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia*, 8.

⁶⁴ Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 15.

Sikap ini merupakan usaha Belanda untuk menjaga kelestarian penjajahannya, pemerintah Belanda melihat bahwa penguasaan masalah Islam merupakan faktor kunci pemecahan. Bagaimanapun juga Islam harus dihadapi karena “semua yang menguntungkan Islam di kepulauan Jawa akan merugikan kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda.”

Ekspansi bangsa Eropa kedaerah Timur adalah sebagai kelanjutan dari perang salib, meskipun kedatangan mereka dengan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya Portugis dan Spanyol dengan tujuan missionaris. Berbeda dengan Belanda, awal kedatangannya adalah untuk tujuan ekonomi. Akan tetapi apabila perhatian pemerintah Hindia-Belanda pada kepentingan *Zending* dirasa kurang, maka mereka sering mendapat tekanan kuat dari partai Kristen di dalam parlemen. Parlemen berharap agar pemerintah menyudahi tanggung jawabnya untuk membawa tanah jajahan pada tahap kemajuan dengan melakukan *Zending* maupun misi. Penyebaran agama Kristen di kawasan ini berjalan seiring dengan perluasan penjajahan, karena “*Zending* Kristen harus dianggap sebagai faktor penting bagi proses penjajahan,” bahkan “perluasan kolonial dan ekspansi agama merupakan gejala simbiose yang paling menunjang.”⁶⁵ Namun, bagaimana juga usaha yang dilakukan pemerintahan Hindia-Belanda untuk menguasai penduduk setempat melalui misi pengkristenan pada akhirnya mendapat perlawanan dari tarekat dan Pan Islam yang berkembang ditengah-tengah pribumi. Beberapa dilatar belakangi pertarungan diatas adalah Cianjur Sukabumi (1885). Bermula dari tulisan Brunner dalam *Javabode* tanggal 22 september 1885 berjudul perang

⁶⁵ Ibid., 18.

salib. Dalam tulisannya Brunner menyatakan adanya kegelisahan dan suasana keruh di Cianjur Sukabumi akibat aktifitas gerakan tarekat Naqshabandiyah. Seperti juga peristiwa Cilegon (1888), pemberontakan ini anggotanya banyak terdiri dari pengikut tarekat, salah satu identitas gerakan tersebut adalah *xenophobia* (anti orang asing) dan menggalakkan perang suci, dan juga peristiwa Garut (1919).

Pan Islam memiliki arti penyatuan seluruh dunia Islam dibawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang khalifah. Di Indonesia sendiri, masyarakat yang beragama Islam memiliki hubungan erat dengan khalifah Turki. Dalam hal ini Snouck Hurgronje yang merupakan peletak dasar politik Islam yang paling pandai pada masa itu, mendukung pemerintah untuk bertindak tegas dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap para mukminin dan orang-orang Arab yang menetap di Nusantara sebab mereka menganggap kedua unsur tersebut sangat membantu terhadap perkembangan Pan Islam di Nusantara.⁶⁶

Untuk menerapkan politik islamnya Dr. Cristian Snouck Hurgronje mendirikan sebuah tempat kerja yang dikenal dengan *Kantoor Voor Inlandsche Zaken*, tugas utama kantor ini adalah sebagai pusat yang berwenang dalam memberikan nasehat kepada pemerintah Hindia-Belanda dalam masalah pribumi. Pada perkembangan selanjutnya, kantor tersebut dituduh terlalu memberi hati kepada masyarakat pribumi hal ini dikarenakan adanya keinginan yang berlainan arah diantara keduanya, pemerintah Hindia-Belanda umumnya menghendaki garis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁶ Muhammad Kholil, "Politik Islam Hindia Belanda", dalam <http://gudang.tugasku.blogspot.com/2012/09/politik-islam-hindia-belanda.html>. (30 September 2012)

keras terhadap masyarakat pribumi, sebaliknya kantor tersebut memilih garis lunak dan berada dalam barisan etis.⁶⁷

Selama bertugas kantor tersebut bersinggungan dengan lingkungan politik secara umum dan juga berhubungan langsung dengan Gubernur Jendral, para kepala daerah, dan direktur berbagai departemen perwakilan-perwakilan Belanda di luar negeri, pihak pribumi baik individu maupun kelompok dengan cara resmi ataupun pribadi. Kantor ini juga lebih sering berhubungan dengan departemen dalam negeri dari pada departemen pendidikan dan agama. Hal itu karena kantor tersebut mengurus masalah Islam, sehingga harus erat hubungannya dengan urusan dalam negeri yang penuh dengan masalah administrasi setempat. Hubungannya dengan departemen kehakiman cukup erat, karena hampir semua penduduk pribumi beragama Islam. Hubungannya dengan departemen keuangan terjadi dalam hal-hal semacam pajak wakaf dan lain-lain, yang berkaitan antara agama Islam dan perekonomian negara.⁶⁸

Para penasehat (adviseur) pada zaman kolonial antara lain:

1. Dr. C. Snouck Hurgronje (1899-1906) langkah awalnya adalah melawan ketakutan Belanda terhadap Islam dan meyakinkan bahwa dalam Islam tidak adanya lapisan klerikal (kependetaan).
2. Dr. C. A. J. Hazeu (1907-1913 dan 1917-1920) menjalin hubungan harmonis antara dirinya sendiri dengan SI sehari sebelum kongres pertama SI di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁷ Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 99.

⁶⁸ Ibid.

Bandung dan meskipun mendapat tantangan dari pihak Belanda Hazeu berhasil mendekati penduduk pribumi.

3. Dr. D. A. Rinkes (1914-1916) memiliki hubungan dekat dengan SI nasehat rahasianya menarik beberapa kalangan bahkan beberapa pihak menghendaki agar nasehat tersebut disebar luaskan, setidaknya kepada anggota *Volkstraad*.
4. R. A. Kern (1921-1922 dan 1924-1926) memberikan rekomendasi bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengakui organisasi buruh.
5. Gobeel (1923 dan 1927-1937) memperbolehkan adanya pembacaan Al-Qur'an dan maknanya ketika pembukaan suatu pertemuan, hal itu sebelumnya dilarang oleh pemerintah kolonial.
6. Dr. G. F. Pijper (1937-1942) setiap penyelesaian masalah pribumi, dia hampir selalu menggunakan kontak pribadi dan mengadakan musyawarah dengan organisasi pribumi tersebut, hal itu agaknya dikarenakan dia memang tidak berpijak pada sudut pandang politik.⁶⁹

Beberapa cuplikan dari tulisan-tulisan karya Snouck Hurgronje, yang menjadi dasar-dasar pemikirannya:

1. Bahaya-bahaya yang diancamkan oleh agama Islam pada setiap negara yang memerintah atas pemeluk-pemeluk agama Islam itu, sudah Yang Mulia ketahui, maka tidak perlu lagi diadakan ikhtisar atas ulasan saya mengenai hal itu yang sudah sejak bertahun-tahun setiap kali diulang-ulang. Dalam tahun-tahun terakhir pengaruh-pengaruh yang merusak itu di atas segala-galanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁹ Muhammad Kholil, "Politik Islam Hindia Belanda", dalam <http://gudang.tugasku.blogspot.com/2012/09/politik-islam-hindia-belanda.html>. (30 September 2012)

bekerja dengan jalan menggunakan tarekat-tarekat yang semakin bertambah kuat dan luas, yang di Afrika Barat dan Tengah telah menyusun dakwah teratur untuk menghidupkan cita-cita politik dan religius bagi Islam, sedangkan yang religius itu terutama juga dijalankan di Hindia Timur. Perang jihad yang dahulu diadakan negara-negara *Mohammadan* telah digantikan dengan tak kurang giatnya dengan perang jihad yang diadakan oleh tarekat-tarekat yang dimaksud itu. Tujuannya ialah agar mendapat penguasaan yang sempurna atas roh-roh. Masuknya massa telah dipermudah karena syarat-syaratnya telah diturunkan. Syarat utama yang berupa ketaatan untuk tidak bertanya kepada para pemimpin, lebih-lebih lagi, dipertahankan secara murni. Maka telah dibentuk badan-badan yang lincah yang semakin perlu diperhitungkan orang dibidang politik.⁷⁰

2. Mengenai nilai suatu agama, pandangan senantiasa akan berbeda; yang satu beranggapan bahwa dalam agama Islam hampir seluruhnya adalah sangat baik, yang lainnya menilainya sebagai gila dan mengerikan; agama ini dilihat dari luar, dari upacara-upacaranya, walaupun dilakukan dengan fanatisme yang berlebihan, hampir semua orang mendapat kesan yang mendalam karena kesederhanaan dan kesungguhan yang patut di hormati. Dalam keseluruhannya, upacara-upacara Islam sungguh tidak lebih buruk dari pada agama lainnya. Penetapan upacara-upacara dalam masyarakat, atas petunjuk dan restu Allah, dalam banyak hal menunjukkan kemauan besar untuk ketertiban, kepatuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷⁰ E. Gobe'e dan C. Andriaanse, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889-1936* (Jakarta: INIS, 1990), 26.

dan keadilan. Hanya mengenai kedudukan kaum wanita yang menyedihkan, merupakan alasan berat untuk memberi nilai lebih tinggi kepada hukum agama ini. Dikebanyakan negeri Islam, kaum wanita menduduki tempat rendah dalam hal kesusilaan dan kecerdasan; ada cerita mengenai Nabi Muhammad, semasa hidupnya, ia diizinkan Allah untuk menjenguk sejenak ke neraka, terutama ia telah melihat sebagian besar wanita.⁷¹

3. Dua belas tahun lamanya wahyu yang terus diturunkan dan diulang-ulang itu mendapat tantangan dari rekan sebangsa Muhammad. Karena skeptisisme mereka tak tergoyahkan, wahyu itu dijadikan bahan olok-olok. Meskipun demikian ada sekelompok kecil yang menjadi penganut, yaitu beberapa anggota keluarga Nabi, orang miskin, dan sekelompok tokoh penting yang seharusnya lebih berpengaruh. Diikuti para pengikutnya, dan dengan perasaan amarah, Muhammad meninggalkan kota kelahirannya, menyerahkannya dalam tangan Tuhan pembalas. Maka terjadilah hijrah yang artinya bukan melarikan diri seperti yang sering ditafsirkan orang, melainkan pemutusan hubungan: pemutusan hubungan dengan segala ikatan yang menyatukannya dengan kaum kafir di dalam sukunya. Dengan menetap di Madinah, ia dapat membentuk masyarakat baru yang kekuatan pemersatunya tidak didasarkan atas kesatuan darah, melainkan atas kesatuan iman.⁷²

4. Pendapat Snouck tentang klerikal dalam Islam, dahulu dangkal sekali pengetahuan bangsa Eropa akan segala hal ini, dan seperti halnya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
⁷¹ Snouck Hurgronje, *Tulisan-tulisan tentang Islam di Hindia Belanda* Kumpulan

karangan Snouck Horgronje (Jakarta: INIS, 1992), 21-22.

⁷² Snouck Hurgronje, *Kumpulan karangan Snouck Horgronje. jilid IV, bagian 2* (Jakarta: INIS, 1994), 6.

pegawai-pegawai mesjid yang dianggap sebagai pendeta-pendeta oleh mereka. Demikian pula halnya dengan penghulu dan orang-orang bawahannya yang ikut bersidang, dikiranya mereka ini dewan hakim dan dipakailah istilah resmi “priesterraden” (pengadilan agama).⁷³

5. Cara pernikahan yang diinginkan kolonial, dalam hal ini untuk melangsungkan pernikahan diantara orang-orang Jawa, kedua belah pihak diantar oleh petugas desa (lébe atau modin) yang bersangkutan ke pegawai urusan perkawinan, biasanya merangkap penghulu mesjid kewedanaan atau kecamatan, sedangkan dua orang dari antara pegawainya, yang menurut hukum Islam, agaknya dianggap cakap, bertindak selaku saksi. Setelah menurut keterangan para lebai berdasarkan hukum agama ternyata tidak ada keberatan apa pun terhadap perkawinan itu, maka pejabat pernikahan, untuk memudahkan segala sesuatu, minta kuasa kepada wali nasab dari pihak perempuan, untuk bertindak atas namanya, sehingga urusannya berjalan lebih lancar dari pada kalau dia harus menuntunnya mengucapkan kalimat-kalimat yang diperlukan. Setelah mengucapkan pidato pembukaan singkat yang mengandung suatu ajaran agama, dia memegang tangan mempelai laki-laki dan mengadakan akad nikah menurut cara yang telah ditetapkan, yang kemudian disusul dengan mengucapkan doa restu.⁷⁴
6. Pandangan Snouck Hurgronje tentang Zakat, dimana masih ada lagi satu soal yang menarik perhatian pegawai masjid: yaitu pendapatan dari zakat, semacam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷³ Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda* (Jakarta: Bhrata karya aksara, 1993), 17.

⁷⁴ Snouck Hurgronje, *Kumpulan karangan Snouck Horgronje, jilid V* (Jakarta: INIS, 1994), 51.

pajak (berdasarkan) agama yang di Hindia Belanda pada pokoknya ditetapkan sebanyak 10% dari hasil pertanian. Zakat berarti sesuatu, untuk sebagian besar itu berkat kegiatan para pegawai mesjid yang dalam hal ini sekali-kali tidak bekerja dengan cuma-cuma. Sebagai orang-orang ahli mereka dapat menguasai pemungutan dan pembagiannya, yang hasilnya menurut hukum agama sebagian menjadi hak mereka.⁷⁵

7. Sedangkan pendapat Snouck tentang masyarakat adat dan masyarakat Islam bahwa di beberapa tempat seperti: ibu kota Palembang, keresidenan Banten, beberapa bagian dari Priangan, beberapa tempat di Kalimantan Selatan dan Timur, yaitu kewajiban menjalankan shalat sudah meresap dikalangan umum, rakyat biasa dan pemimpin-pemimpin pemeritahan merasa betah di mesjid seperti kaum alim-ulama dan orang-orang yang beriman karena jabatannya, (“de lijnen” kata orang Belanda). Akan tetapi, mereka yang setiap hari atau hanya setiap hari jumat dan pada hari-hari raya resmi mengunjungi mesjid untuk beribadah itu hanyalah merupakan golongan kecil sekali, yang oleh penduduk lainnya agaknya dianggap sebagai golongan tersendiri.⁷⁶ Terutama di pulau Jawa demikian halnya, kebanyakan mereka hampir selalu mengabaikan kewajibannya untuk bersembahyang dan agaknya sulit juga bagi mereka untuk sekali-kali menjalankan peraturan-peraturan membersihkan diri dari segala hadas yang diharuskan sebagai persiapan sebelum sembahyang, dan melakukan dengan agak tepat segala gerakan sembahyang. Bahkan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
⁷⁵ Snouck Hurgronje, *Kumpulan karangan Snouck Horgronje, jilid IX* (Jakarta: INIS, 1994), 41.

⁷⁶ Snouck Hurgronje, *Kumpulan karangan Snouck Horgronje, jilid VIII* (Jakarta: INIS, 1994), 100.

mereka yang dengan setia mematuhi kewajibannya bersembahyang lima waktu sehari, biasanya juga jarang atau sama sekali tidak pergi ke mesjid untuk maksud itu; mereka merasa malu untuk pergi ke sana kalau bukan pada waktu ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Perasaan canggung, pakaian yang membedakan mereka dari pengunjung-pengunjung mesjid yang tetap dan macam-macam hal lain turut menjadi sebab mereka malu; kenyataan bahwa mereka biasanya tinggal di luar mesjid oleh semua orang diterima sebagai suatu hal yang wajar. Hanya pada waktu-waktu kehidupan keagamaan yang luar biasa ramainya hal ini menjadi lain.⁷⁷

8. Puasa, dalam bulan kesembilan tahun Hijriyah dijalankan oleh lebih banyak orang dari pada shalat. Sering puasa diartikan sebagai pelepasan dosa tahun yang silam, dan pemberian selamat oleh yang muda kepada yang lebih tua, oleh yang rendah kepada atasannya.⁷⁸
9. Apabila berpuasa bagi kebanyakan orang berarti pelepasan dosa untuk setahun penuh, melakukan ibadah Haji ke Mekkah dan daerah sekitarnya, yang biasanya dilakukan bersama-sama dengan berziarah ke makam Nabi Muhammad, dianggap membawa pengampunan bagi dosa-dosa seluruh kehidupan sebelumnya. Rukun ini, yang hanya berlaku bagi orang-orang yang keuangannya, kesehatannya dan keadaan lainnya mengizinkan untuk melakukan perjalanan itu tanpa adanya keberatan bagi mereka dan keluarganya, di Nusantara makin lama makin dikenal. Apabila seseorang meninggal dunia belum melakukan ibadah Haji, padahal melihat keadaan

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda* (Jakarta: Bhrata karya aksara, 1983), 26.

hidupnya ia mampu untuk melakukannya, maka sebagian dari harta peninggalannya, adalah hutang kepada tuhan. Oleh karena itu, sejumlah uang disisihkan dipergunakan sebagai upah seorang wakil (badal haji). Banyak sekali uang demikian itu setiap tahun dikirim ke Mekkah, yang sangat dinantikan oleh baik penduduk Mekkah maupun orang-orang Indonesia yang bermukim disana.⁷⁹

A. Bidang Ekonomi

Politik Imperialisme yang dijalankan oleh Belanda di Indonesia selama periode tahun 1850 sampai tahun 1900. Periode baru bagi imperialisme Belanda ditandai oleh politik kolonial yang berbeda sekali dengan politik kolonial yang telah dijalankan sebelumnya.⁸⁰

Imperialisme itu adalah akibat mutlak dari bentuk produksi kapitalis. Interpretasi ekonomis kerap kali dipergunakan untuk menerangkan ekspansi kolonial sebagai kepentingan kaum kapitalis yang akan menanam kelebihan modalnya atau kepentingan akan pasaran baru dan kepentingan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah yang sangat esensial bagi industri-industri di tanah airnya. Dalam hubungan ini ada dua soal yang perlu diterangkan. Pertama, dalam periode sebelum tahun 1850 ekspansi Belanda dapat disamakan dengan kolonialisme dalam arti marxistis, karena ada akumulasi modal dan kelebihan produksi di negeri Belanda. Kedua, politik kolonial Belanda sesudah tahun 1850

harus diterangkan tidak hanya dari segi motif ekonomis saja, tetapi sifat dan

⁷⁹ Ibid., 27.

⁸⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari kolonialisme sampai nasionalisme* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), 3.

sebab-sebabnya harus juga dipelajari dari segi perluasan militer, perluasan pegawai, perluasan politik dan agama masing-masing sebagai faktor penentu atau faktor pembantu. Adapun imperialisme Belanda adalah manifestasi-manifestasi dari idealisme politik dan agama. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa selain imperialisme ada pula liberalisme, humaniterisme, kristianisme ikut serta dalam membentuk politik kolonial Belanda.⁸¹

Ideologi-ideologi politik yang besar di Eropa pada abad ke-19 sangat berpengaruh pada imperialisme dan politik kolonial. Liberalisme mulai berkembang di negara Belanda pada periode sesudah Napoleon dan berhasil mengubah struktur politik pada kira-kira pertengahan abad itu. Dalam masa empat puluh tahun berikutnya lahirlah politik kolonial yang lazim disebut politik kolonial liberal. Menjelang berakhirnya abad itu, sosialisme tumbuh sebagai kekuatan baru dalam politik Belanda dan segera tampil sebagai pendekar antikolonialisme. Di dalam menyerang imperialisme, kritik mereka berbeda sekali dengan kritik kaum liberal; pada pokoknya kaum sosialis mengutuk semua politik imperialistis sebagai alat kapitalisme, sedang kritik-kritik kaum liberal hanya mengenai detail-detail dari politik kaum kolonial. Di dalam memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda, bahwa “daerah-daerah taklukan harus memberi keuntungan material bagi Belanda, keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukkannya.”⁸²

⁸¹ Ibid., 1-5.

⁸² Ibid., 6-7.

Periode antara tahun-tahun 1850 dan 1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan perdagangan Eropa, dan negeri Belanda mendapat keuntungan dari perkembangan ini. Masa dua puluh tahun itu bagi negeri Belanda merupakan periode transisi dari keadaan pra-industri ke industri. Pabrik-pabrik dalam berbagai cabang industri, jalan-jalan kereta api, posisinya sebagai pasar mentah internasional telah diduduki kembali, pelayaran maju dengan cepat, bank-bank baru, didirikan.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa *Cultuurstelsel* ikut serta membantu membangun kembali ekonomi secara besar-besaran, disamping memasukkan jutaan kekayaan ke dalam perbendaharaan Belanda. Ekspansi perdagangan internasional Belanda terutama disebabkan oleh berkembangnya impor hasil-hasil dari Indonesia dan meningkatkan perdagangan transito. Kesejahteraan ekonomi dalam pertengahan abad ke-19 tercermin dalam keuangan negara. Kesejahteraan didapatnya dari hasil-hasil finansial *Cultuurstelsel*. Gejala yang menyertai industrialisasi dan perdagangan bebas adalah berkembangnya dan bergeraknya modal. Perkembangan bank-bank yang cepat antara tahun-tahun 1850 dan 1870 menunjukkan adanya konsentrasi dan sentralisasi modal.

Berlakunya sistem tanam paksa, modal dasar dari sektor agro-ekonomi ekspor berlipat ganda, sebagian besar berkat hubungan erat yang terjalin antara keluarga-keluarga Eropa di Jawa. Dikalangan kaum tani Jawa juga mulai tumbuh perasaan bahwa mereka dapat berkembang, bahkan lebih pesat dan dapat bekerja lebih efisien, jika pemerintah tidak campur tangan lagi dalam penanamannya.

Menurut pendapat para penulis, pembentukan modal dikalangan para pengusaha perkebunan dan wirausahawan Cina juga terjadi pada waktu yang sama.⁸³

Selain pembentukan modal, penyediaan tenaga kerja yang mencukupi dengan biaya murah merupakan prasyarat pokok bagi penanaman hasil bumi berorientasi ekspor. Pada abad ke-19, penguasaan atas tenaga kerja jauh lebih penting ketimbang penguasaan tanah. Tanah tersedia sangat berlimpah, sementara persediaan tenaga kerja sangat sedikit, selain juga sulit dikendalikan dan dipekerjakan. Sistem Tanam Paksa memecahkan masalah itu dengan mengeksploitasi –dalam cara baru- pola tradisional tenaga kerja Jawa lewat wajib setor hasil bumi dan kerja kepada penguasa lebih tinggi.⁸⁴

Salah satu tujuan sistem tanam paksa adalah agar masyarakat Jawa tetap statis, yaitu tetap mengikuti pola-pola kekuasaan tradisional masyarakat Jawa dalam mengerjakan produksi tanaman dagang ekspor. Namun kenyataannya tidak terjadi demikian, dampak ekonomi sistem tanam paksa justru mendorong perubahan-perubahan dan mempercepat kecenderungan-kecenderungan yang memang sudah ada. Pola-pola kuasa tradisional kalangan supra desa sudah berantakan sejak permulaan abad ke-19.⁸⁵

Reaksi yang berasal dari sistem eksploitasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus-menerus. Penjajah melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan ekonominya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
⁸³ Robert Van Niel, *Sistem tanam paksa di Jawa* (Jakarta: Pustaka: LP3ES, 2003), 268-269.

⁸⁴ *Ibid.*, 270.

⁸⁵ *Ibid.*, 276.

sehingga motif ekonomi pada situasi kolonial menjadi faktor dominan untuk menentukan hubungan antara golongan-golongan sosial. Meskipun ideologi kolonial abad ke-20 menghapus istilah *wingwest*, tetapi kenyataan pemerintah kolonial tetap mempertahankan dan bahkan mengesahkan eksploitasi modal perseorangan. Kepentingan kaum kapitalis lebih mendapat prioritas daripada kepentingan rakyat jajahan.

Kedudukan yang menguntungkan penjajahan itu diperoleh melalui eksploitasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, usaha-usaha ke arah emansipasi ekonomi selalu ditekan. Semua pengalaman yang mengecewakan sebagai akibat sistem sosial-ekonomi yang menghalangi usaha perekonomian bangsa Indonesia, mendorong timbulnya solidaritas. Solidaritas ini diwujudkan dalam bentuk reaksi yang diucapkan dan agitasi yang keras terhadap orang-orang asing, terutama terhadap orang-orang Cina. Karena usaha dagangnya timbullah rasa benci dari pihak Pergerakan Nasional Indonesia seperti SI misalnya.⁸⁶

Situasi sosial-ekonomi yang makin buruk menyebabkan pergerakan itu lebih radikal dan revolusioner. Pemogokan pegawai-pegawai pegadaian pada tahun 1922 dan pemogokan kaum buruh kereta api pada tahun 1923 memanasikan kejengkelan-kejengkelan hati terhadap krisis sosial-ekonomi yang terpaksa dijalankan oleh rakyat. Aspek politik pergerakan nasional pada tahun-tahun itu menunjukkan perubahan kearah anti-Belanda dan kearah aliran non-kooperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁸⁶ Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 233.

Setelah pergerakan nasional sadar akan politik kolonial yang memberi hak monopoli kepada sekelompok kolonialis, maka secara perlahan-lahan mereka mulai bergerak kearah bidang politik.⁸⁷ Perjuangan terhadap penindasan dan eksploitasi ekonomi dilakukan terutama melalui jalan politik berdasarkan kesadaran bahwa kebebasan ekonomi hanya akan terwujud setelah kemerdekaan politik tercapai.⁸⁸

B. Bidang Politik

Pentingnya politik Islam Indonesia, termasuk Islam Jawa, sebagian besar berakar pada kenyataan bahwa didalam Islam batas antara agama dan politik sangat tipis. Islam adalah suatu *way of life* dan agama; dan meskipun di Indonesia proses pengislaman dari dulu senantiasa merupakan suatu proses setahap demi setahap, kandungan politik yang ada didalamnya sudah terasa sejak awal perkembangannya.

Islam bukan saja datang untuk menetap dan menyebarkan pengaruhnya, karena sudah sejak masa-masa yang sangat awal ia telah memainkan peranan politik dan ideologis yang luar biasa pentingnya. Sama halnya proses pengembangan Islam ditolong oleh orang-orang Portugis pada tingkat-tingkat awalnya, maka tidak kurang paradoksnya, dia semakin dikembangkan oleh keperluan pemerintahan Belanda yang terus-menerus di kepulauan Indonesia. Meskipun sudah “tidak murni” dan meskipun adanya kompromi-kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan pra-Islam, bagi orang-orang Indonesia, Islam

⁸⁷ Ibid., 234-235.

⁸⁸ Ibid.

berfungsi sebagai titik pusat identitas, untuk melambangkan keterpisahan dari dan perlawanannya terhadap penguasa-penguasa Kristen dan Asing.⁸⁹

Ketaatan kepada agama Islam di tingkat pedesaan yang menyebabkan orang-orang merasa tidak mungkin menerima pemerintah kolonial sebagai bentuk pemerintahan yang sah dan langgeng di dalam pikirannya, termasuk penduduk desa yang paling tidak terdidik sekalipun. Proses penaklukan yang dilakukan Belanda dan membaiknya hubungan komunikasi sebagai akibat yang tidak dapat dihindarkan dari *pax Neerlandica* dari abad ke-18 dan seterusnya, membantu mempercepat pengembangan agama Islam di daerah pedesaan, terutama di Jawa. Sebagai akibat perkembangan ini, maka ulama dan kiyai, yang menjadi guru dan penyebar agama Islam mulai memainkan peranan yang dari hari ke hari semakin penting di pedesaan Indonesia bukan saja dari segi jumlah akan tetapi juga secara psikologis dan ideologis.

Sejak pertengahan kedua abad ke-19 dan seterusnya agama Islam Indonesia secara bertahap mulai menanggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik. Dengan adanya perhubungan laut yang semakin membaik, semakin banyaklah haji-haji Indonesia yang diantarkan ke kota suci, beberapa orang diantaranya bermukim bertahun-tahun lamanya di Mekkah dengan demikian mengambil bagian dalam kehidupan Islam yang khas Timur Tengah. Ketika mereka kembali

⁸⁹ Ibid., 32.

ke Indonesia haji-haji pembawa pembaharuan ini bertindak sebagai penyebar aliran Islam ortodoks.⁹⁰

Berhadapan dengan kondisi umat Islam di wilayah jajahannya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya mengenai ibadah haji. Tahun 1825, jemaah haji di pulau Jawa diwajibkan membayar 110 gulden untuk memperoleh izin berangkat haji. Beslit tersebut tertanggal 18 Oktober 1825 No 9, dengan denda bagi yang tidak mengambil pas jalan sebesar 1000 gulden. Beslit tersebut disampaikan secara rahasia kepada residen- residen yang ada supaya tidak menimbulkan gejolak. Beslit no 9 tahun 1825 tersebut kemudian diganti dengan beslit tahun 1831. Peraturan itu diperketat, mereka yang tidak membayar, sekembalinya dari Mekkah akan dikenakan bayaran dua kali lipat.⁹¹

Dalam tahun 1859, calon haji harus menyertakan bukti bahwa mereka kuat dalam keuangan, hingga mampu menjamin keperluan keluarga yang mereka tinggalkan. Peraturan ditahun 1859 tersebut juga menerangkan, bahwa sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, para jemaah harus diuji ditempat tinggal mereka. Materi ujian adalah seputar soal- soal Mekkah dan Islam. Hanya apabila mereka lulus dari ujian ini barulah berhak mempergunakan gelar haji didepan nama mereka.⁹²

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Noer, *Gerakan Moderen Islam*, 31.

⁹² Ibid.,32.

Gelombang Ortodoksi terbaru mengubah setiap pesantren, sekurangnya secara potensial, menjadi pusat sentimen anti-Belanda. Agitasi Islam jelas semakin bertambah menjawab rangsangan-rangsangan ekonomi dan politik yang merugikan. Keresahan di desa, yang cepat berjangkit di wilayah pedesaan di Indonesia, sangat sering meluap menjadi pemberontakan singkat di bawah pemimpin Islam. Pemberontakan-pemberontakan yang sungguh-sungguh dan tersebar luas, kebanyakan dilancarkan sebagai “perang sabil” atas nama Islam, selama abad ke-19 yang menyaksikan proses konsolidasi pemerintahan Belanda di Jawa dan Sumatra.

Frekuensi dan luasnya keresahan di desa di bawah pimpinan Islam dan “perang sabil”, menjelang akhir abad yang lalu, menyebabkan perhatian yang makin besar dikalangan para pejabat yang kurang siap untuk menghadapi militansi Islam Indonesia yang semakin meningkat. Secara tradisional sikap Belanda terhadap Islam Indonesia telah dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan dan pengharapan yang berlebih-lebihan; keduanya lahir dari kekurangan akan pengetahuan yang tepat, kalau bukannya ketiadaan pengetahuan sama sekali.

Berdasarkan latar belakang inilah pada tahun 1889 seorang ahli bahasa Arab dan ahli Islam, Cristian Snouck Hurgronje diangkat menjadi penasehat pada sebuah kantor yang baru dibentuk untuk menangani masalah-masalah Arab dan Pribumi.⁹³ Kedalam kantornya dimasukkannya bukan saja para ahli, dengan energi yang tak mengenal lelah dan kesungguhan moral, akan tetapi, sekurangnya

⁹³ Ibid., 41.

kurangnya yang sama pentingnya, juga yang berpandangan bagi masa depan evolusi masyarakat Indonesia sesuai dengan tradisi-tradisi terbaik liberalisme abad ke-19. Snouck melawan ketakutan Belanda terhadap Islam, baik di tingkat Internasional dan tingkat lokal. Sebagai kolonialis, pemerintah Belanda memerlukan *inlandsch politiek*, yakni kebijaksanaan mengenai pribumi, untuk memahami dan menguasai pribumi. Sekalipun Snouck menegaskan bahwa pada hakekatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun dia pun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik.

Menghadapi medan seperti ini Snouck membedakan Islam dalam arti “ibadah” dengan Islam sebagai “kekuatan sosial politik”. Dalam hal ini dia membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; 3. Bidang politik; dimana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda. Resep inilah yang kemudian dikenal sebagai *Islam Politiek*, atau kebijaksanaan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia.⁹⁴

Secara implisit pandangan yang lebih luas ini berdasarkan tiga pertimbangan utama. Pertama, bilamana Islam –baik dalam bentuk sinkretik dari agama desa di Indonesia atau dalam baju yang lebih ortodoks dari kebudayaan santri yang sedang muncul- bisa dibuat menerima pemerintah asing paling-paling bisa diharapkan untuk menyetujui adanya koeksistensi antara pemerintahan Kristen dengan rakyat Islam. Kedua, meskipun lembaga-lembaga adat merupakan

⁹⁴ Suminto, *politik Islam Hindia Belanda*, 11-12.

rintangan yang secara tradisional paling kuat melawan Islam, dan meskipun dengan demikian wakil-wakilnya merupakan sekutu-sekutu jelas bagi pemerintah kolonial, karena konservatisme yang melekat di dalam dirinya maupun partikularisme lokal, namun adat tidak dapat diharapkan untuk membendung pengaruh yang senantiasa meluas dari agama yang dinamis dan universalistik yang di bawa oleh Nabi Muhammad. Titik inti filsafat kolonialisme Snouck, Indonesia dan terutama Jawa haruslah melangkah ke arah dunia modern di mana Indonesia setingkat demi setingkat sedang menjadi bagiannya. Karena per definisi Indonesia modern tidaklah dapat menjadi Indonesia Islam dan bukanlah pula Indonesia yang diperintah oleh adat, maka dia haruslah menjadi Indonesia yang diperbarat (westernisasi indonesia). Peradaban Belanda haruslah menggantikan peradaban tradisional Priyayi dan, di atas semuanya, peradaban santri.⁹⁵

Berakhirnya perang Aceh disusul dengan penaklukan dan penentraman pulau-pulau di luar Jawa mengakhiri fase operasi-operasi militer. Segera setelah pertukaran abad ke-20, kontrol Belanda telah diperkuat atas seluruh kepulauan Indonesia namun, ketenangan yang relatif tersebut akibat operasi penentraman dan dipakainya secara berhasil, politik Islam Snouck hanya bertahan sebentar tak lama sesudahnya Belanda dihadapi oleh masalah-masalah sosial politik yang baru, dan amat mengganggu di Indonesia. Pasang naik perubahan, yang berlangsung cepat pada tempat pertama muncul di Jawa, pulau yang paling padat penduduknya di Hindia Belanda dan pusat kekuasaan Belanda, meskipun ia juga meluas ke sebagian pulau Sumatra. Meskipun sudah lama tidak pernah beraksi sebagai

⁹⁵ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya), 46-47.

akibat penaklukan dan pemerintahan kolonial, tetapi sebagian juga karena menjawab rangsangan-rangsangan yang luar biasa dari luar, segera menjadi matang. Islam Indonesia, yang tengah mengalami gejolak perubahan mendalam memainkan peranan penting, dan pada tahap-tahap permulaan bahkan memegang pucuk pemimpin, dalam kelahiran suatu cara baru.⁹⁶

Di Abad ke-20 peranan Islam sudah tidak lagi terbatas pada tingkat-tingkat rakyat pedesaan saja. Pemunculan kembali keresahan-keresahan petani yang berpusat di sekeliling ulama-ulama lokal, adalah hanya satu aspek dari gejolak awal abad ke-20. Yang jauh lebih penting dan spekulatif adalah perkembangan-perkembangan di kota sejak mula-mula orang-orang Indonesia yang mendapat pengaruh Barat memegang tampuk pimpinan dalam gerakan-gerakan politik baru yang sebagian berdasarkan ide-ide asosianis. Kedua, sekelompok para pemimpin yang beraneka ragam hanya beberapa saja yang mendapat pendidikan Barat, melahirkan suatu partai politik Indonesia dalam arti sebenarnya di mana unsur Islam memainkan peranan yang penting dan yang beberapa tahun berhasil membakar keresahan-keresahan di desa menjadi suatu gerakan massa di bawah pimpinan orang-orang kota, satu hal yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Islam Indonesia sebelumnya. Akhirnya seiring dengan perkembangan-perkembangan politik ini dalam tingkat tertentu saling bertumpang-tindih; Islam kota mulai terbentuk dan pertumbuhannya secara evolusi mempunyai daya tahan yang lebih kuat dari gejala-gejala politik pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹⁶ Ibid., 23.

ini dan meninggalkan bekas-bekas yang mendalam dalam kerangka Islam Indonesia di bawah pemerintahan kolonial.⁹⁷

Pergerakan nasional sebagai bentuk revivalisme dalam hubungan-hubungan masyarakat kolonial sudah barang tentu mengalami politikalisis, dan bahkan sejak taraf pertamanya pergerakan itu sudah jelas menunjukkan orientasi politik umum. Di tanah jajahan kepentingan ekonomi dan politik terjalin erat antara satu dengan lainnya: dominasi politik melindungi monopoli ekonomi modal kolonial dan menggunakan pemerintah kolonial sebagai alat kekuasaan. Sejak itu disadari bahwa kekuasaan politik diperlukan untuk memaksa pemerintah kolonial memperhatikan kesejahteraan rakyat. Adanya kesadaran rakyat yang makin meningkat terhadap adanya kekuasaan asing, pergerakan emansipasi makin lama makin berorientasi pada politik. Dengan turut ambil bagian dalam mengatur kehidupan rakyat dan memperbaiki nasibnya, bahkan sampai diresmikannya Dewan Rakyat (*Volksraad*).⁹⁸

Dengan berdirinya *Volksraad* maka keinginan-keinginan politik dapat disalurkan dengan resmi kepada pemerintah kolonial. Pengalaman-pengalaman di dalam *Volksraad* menimbulkan keyakinan bahwa melalui “kooperatif” usaha-usaha rakyat tidak akan terlindungi, sehingga golongan nasionalis menganggap sangat perlu menyusun kekuatan rakyat untuk mengambil alih kekuatan politik. Formulasi tujuan politik ini makin lama juga makin terperinci. Perhimpunan

Indonesia, Organisasi mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, membuat analisis

⁹⁷ Ibid., 62.

⁹⁸ Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 242.

yang tepat mengenai hubungan-hubungan kolonial dan mengambil revolusi bahwa pergerakan Nasional harus menuju ke Indonesia Merdeka, sedang kerjasama dengan kaum penjajah ditolak.⁹⁹

C. Bidang sosial

Di dalam masyarakat Islam, guru-guru agama dan ahli kitab suci Islam, kiyai dan ulama, sejak awal merupakan unsur sosial yang penting dalam masyarakat Indonesia. Sewaktu penetrasi Belanda secara terus-menerus menghabiskan kekuasaan politik para sultan, hakim-hakim Islam ini berhasil melancarkan pengaruh yang semakin besar lagi. Dan semakin penting lagi di Indonesia, sebagaimana di dunia Islam, penganjuran-penganjuran Islam yang ortodoks cenderung untuk berbenturan dengan para penguasa sekuler. Adapun para penguasa sekuler ini terdiri dari para priyayi yang didalam dirinya telah berakar sangat kuat kebudayaan Hindu-Jawaisme yang aristokratik mereka biasa di sebut kaum adat.¹⁰⁰

Meskipun telah memeluk agama Islam, para Priyayi tetap melangsungkan aristokrasinya sendiri, yang pada umumnya bertentangan dengan kebudayaan santri dan para ulama yang sedang tumbuh. Dalam kenyataannya Islam Indonesia segera berkembang menjadi dua cabang yang kurang lebih berbeda satu sama lain. Yang satu, cabang resmi dan administratif yang menjadi pembantu pemerintah sekuler. Yang lainnya lagi berpusat disekitar kiyai dan ulama independen yang memperoleh kesuciannya bukanlah berdasarkan restu pemerintahan sekuler akan

⁹⁹ Ibid., 243.

¹⁰⁰ Ibid.

tetapi karena pengetahuannya tentang agama Islam dan bahasa suci, dua kelompok ini selalu bersaing untuk merebut kesetiaan para petani yang mayoritas adalah kaum abangan. Dalam persaingan ini para ulama selalu lebih unggul. Kemerosotan ini pada gilirannya merupakan akibat yang tidak dapat dihindari dari kekuasaan Belanda di Indonesia, yang didalam perjalanan waktu dalam kenyataannya membuat semua raja-raja Indonesia –mau tak mau- menjadi alat kekuasaan Kristen. Kebijakan Belanda untuk menjalankan pemerintahan yang tidak langsung, terutama didalam kurun waktu yang disebut jaman tanam paksa, memperdalam dan memperlebar jurang yang secara tradisional telah ada antara pemerintah dan yang diperintah di dalam masyarakat Indonesia yang hirarkis dan otoriter.¹⁰¹

Prestasi utamanya tak pelak lagi adalah peranan yang dimainkan dalam reorientasi politik, yang bersama dengan taktik-taktik militer yang telah disempurnakan, pada akhirnya mengakhiri perang Aceh. Di samping tujuan yang lebih terbatas ini, maka kemasyhuran Snouck pemerintahan kolonial dengan kebanyakan pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia. Terutama di Jawa, tidak lama berselang sebuah *modus vivendi* muncul menggantikan permusuhan dari masa-masa sebelumnya.

Kekalahan akhir Islam Indonesia dalam arti pembahasan para penganutnya dari apa yang disebut Snouck “batas-batas sempit sistem agama Islam”, akan dicapai dengan jalan berasosiasinya orang-orang Indonesia ke dalam kebudayaan Belanda. Memang wajarlah kalau Snouck memusatkan perhatiannya kepada para

¹⁰¹ Ibid.

bangsawan Jawa, dan kepada elite Priyayi pada umumnya, sebagai suatu kelas sosial yang pertama, dan paling jelas yang harus ditarik ke arah westernisasi. Tingkat kebudayaan aristokrasi yang lebih tinggi, dekatnya dengan pengaruh-pengaruh Barat berkat kontak yang tinggi dengan pemerintah Eropa, dan akhirnya keterpisahannya dari Islam, secara logis menjadi ahli waris skema asimilasionis Snouck.¹⁰²

Persekutuan semacam itu akan mangakhiri jurang antara yang memerintah dan yang diperintah. Karena sudah tidak lagi dipisahkan oleh kesetiaan agama keduanya bisalah mengambil bagian di dalam suatu kebudayaan yang sama dan di dalam suatu kesetiaan politik yang sama. Dengan menggunakan pendidikan sebagai sebuah alat untuk melemahkan Islam, sebenarnya Snouck juga telah membantu pemuda pribumi memasuki abad ke-20 dengan kesiapan untuk menghadapi modernisasi.¹⁰³ Ketegangan-ketegangan sosial mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok menurut stratifikasi sistem produksi dan teknologi modern serta sistem pendidikan dan organisasi pemerintahan Barat, maka masyarakat kolonial dengan strukturnya yang masih bersifat semi feodal mengalami modernisasi dengan semua perubahan sosial yang menyertainya. Hal ini menyebabkan kekuasaan dan prestasi kaum feodal menjadi lemah, dan kekuasaan-kekuasaan ini pindah ke kaum intelektual baru; pembentukan golongan baru menurut fokus sosial baru mulai terjadi, terutama mengenai pergerakan Nasional perlu diperhatikan tentang organisasi-organisasi bebas mereka yang mempunyai sifat-sifat struktur fungsional tersendiri. Orientasi teologis dari

¹⁰² Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 20.

¹⁰³ Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 235.

aktivitas kolektif yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini mencerminkan keinginan khas dari golongan yang ditentukan oleh *situationsgebundehheit* anggota-anggotanya. Pembentukan organisasi-organisasi nasional didorong oleh pertentangan kepentingan sosial dengan kaum penjajah; karena perbedaan rasial pertentangan ini menjadi lebih serius. Organisasi itu fungsinya menjadi lebih nyata dan menunjukkan perbedaan kepentingan-kepentingan tersebut secara lebih jelas; jadi, organisasi-organisasi itu boleh dikatakan meratakan jalan untuk membangun suatu kekuatan sosial, organisasi-organisasi tersebut antara lain: Budi Utomo, SI, IP, PNI, dll.

Oleh karena deferensiasi sistem pemerintah dan politik etis karena demokratisasi sebagai konsekuensi dari pengajaran di antara golongan pribumi banyak yang kehilangan “kejayaan” mereka. Pertumbuhan pergerakan nasional yang cepat mengakibatkan posisi mereka sebagai alat pemerintahan kolonial sangat diperlemah, sedang rakyat sekarang menaruh rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin yang baru. Berbagai fakta pada sejarah Sarekat Islam agaknya membuktikan hal ini.

Anggota-anggota inti SI berasal dari kaum pedagang yang memilih agama sebagai dasar organisasi mereka. Konsep religius membangkitkan secara besar-besaran sentimen nasional dan membina bentuk solidaritas yang efektif dan mencakup seluruh aktifitas golongan-golongan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibid., 236-237.

Tumbuhnya deferensi sosial menyebabkan jumlah organisasi-organisasi nasional bertambah dengan bermacam-macam tujuan untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing sambil berdialog menentang kolonialisme. Anggota dari golongan intelektual banyak yang bersimpati kepada proletariat kota dan mereka membentuk organisasi-organisasi nasionalistis progresif yang non-koperatif. Pandangan ini diikuti oleh kelas menengah; para pedagang, pengusaha industri kecil, petani kaya, dan kelas-kelas lainnya yang melakukan pekerjaan bebas.

Bentuk solidaritas pada pergerakan Nasional ini makin lama makin menjadi prinsip Nasionalisme Indonesia dan demokrasi, sehingga klasifikasi berdasar atas kriteria regional makin lama makin berkurang dan stratifikasi sosial berubah. Cita-cita kebebasan dan kesatuan dipakai sebagai pedoman pendidikan praktis. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan berfungsi sebagai nasionalisme dari segi sosialnya. Seperti yang dikatakan oleh pendirinya, pendidikan nasional adalah cara yang sebaik-baiknya untuk bekerja secara produktif untuk mencapai kemerdekaan rakyat dimana kebudayaan asli dipakai sebagai dasar pokoknya.¹⁰⁵

Mengenai pendidikan nasional, ada 3 fase dalam perkembangan pendidikan di Hindia-Belanda pada abad ke-20. Tahun 1900-1915, pendidikan Barat dianggap sangat penting bagi pribumi, tahun 1915- 1927, timbul reaksi yang menghendaki agar pendidikan bagi pribumi tidak melepaskan mereka dari kebudayaan aslinya, selanjutnya pada tahun 1927-1942 merupakan fase pengurangan pendidikan Barat yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa

¹⁰⁵ Ibid., 238-239.

pengantar, sejalan dengan keinginan mengadakan penghematan dalam bidang pendidikan dikarenakan situasi ekonomi keuangan pemerintah kolonial pada waktu itu.¹⁰⁶ Dalam beberapa fase tersebut, pihak pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan-kebijakan untuk pendidikan di Indonesia. Ordonansi guru dikeluarkan pada tahun 1905 dan 1925, ordonansi tahun 1905, no. 550, yang berisi mengenai kewajiban setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Sedangkan ordonansi tahun 1925, hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri, kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di negeri ini.¹⁰⁷

Ordonansi ini menimbulkan beberapa protes dari umat muslim Indonesia, misalnya, peristiwa yang terjadi di Sekayu tahun 1926. Keluhan oleh haji Fachruddin ketua Muhammadiyah mengenai masalah yang ditimbulkan ordonansi tersebut pada kemajuan dan penyebaran Islam di Indonesia. Reaksi lainnya adalah kongres Al-Islam tahun 1926, (1-5 Desember di Bogor).¹⁰⁸

Penghematan pendidikan ditolak secara aklamasi, pada penglihatan mereka, peninjauan ini berlatar belakang faktor ekonomis dan politis. Dikatakan ekonomis karena pendidikan Barat memberikan kemungkinan bagi pribumi untuk menyaingi orang Eropa, dan dikatakan politis karena umumnya masyarakat Eropa

¹⁰⁶ Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 46.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 51-52.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 55-56.

mendukung pendidikan Barat bagi pribumi, bila pendidikan tersebut menolong kepentingan mereka.¹⁰⁹

Dampak dari kebijakan tersebut adalah munculnya sekolah-sekolah liar, sebenarnya sekolah-sekolah liar tersebut adalah sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh pihak pribumi. Besarnya minat mereka untuk menyelenggarakan pendidikan Barat ini bisa dimaklumi, sebab aneka jabatan di lingkungan pemerintah kolonial justru menghendaki pendidikan Barat. Disamping itu pendidikan Barat juga memungkinkan seseorang untuk memperluas pergaulannya dengan Belanda sebagai kelas penguasa, mereka tidak menolak sifat Baratnya pendidikan semata, tapi yang mereka inginkan adalah tertanamnya jiwa Indonesia pada pendidikan tersebut. Salah satu bentuk dari gerakan ini adalah peran Muhammadiyah dalam mendirikan MULO pada tahun 1937, di Yogyakarta.¹¹⁰

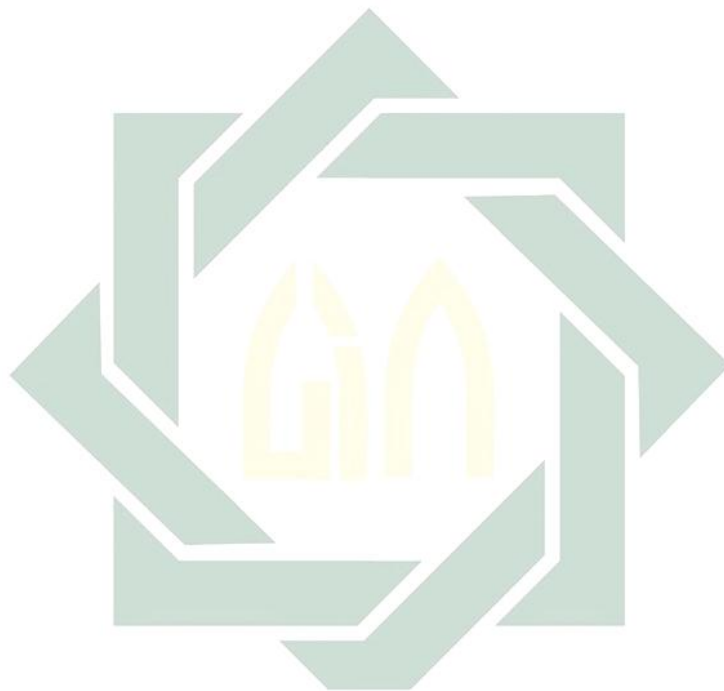
Melalui *Volksraad* mereka (Sarekat Islam) tegaskan bahwa pendidikan swasta ini seharusnya ditolerir pemerintah karena merupakan inisiatif sendiri, ditengah ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang cukup.¹¹¹ Gerakan kebudayaan memperkuat kesadaran nasional dan merupakan tambahan bagi gerakan ekonomi yang mencita-citakan kehidupan ekonomi yang bebas bagi rakyat. Pergerakan nasional ingin membangun kebudayaan baru sebagai basis kehidupan baru dengan mengambil alih unsur-unsur Barat. Pembaharuan ini dianggap sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita

¹⁰⁹ Ibid., 46.

¹¹⁰ Ibid., 47.

¹¹¹ Ibid., 61.

politik, oleh karena itu dalam menghadapi kebudayaan Barat kaum nasionalis menolak ide asimilasi dalam rangka Negeri Belanda Raya.¹¹²



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹² Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 241.